MUKADIMAH
Jurnal Pendidikan, Sejarah, dan Ilmu-ilmu Sosial
Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP - Universitas Islam Sumatera Utara, Medan
e-Journal: http://jurnal.uisu.ac.id/index.php/mkd | e-mail: mukadimah@fkip.uisu.ac.id
ISSN: 2622-1373 (Online)
ISSN: 2614-1159 (Print)
Volume 5 | Issue 2
August 2021

DINAMIKA PERKEMBANGAN GOLKAR DI KOTA MEDAN: GOLKAR PADA PEMILU 1971

Ronggur Raja Doli Simorangkir*

Magister Ilmu Sejarah Universitas Sumatera Utara, Indonesia

Abstract

This article aims to discuss how the New Order which was dominated by the army dimension used the Golkar Secretariat as a political machine in defending the interests of the government and the military. Initially, the Golkar Secretariat was only filled with around 64 organizations under it. However, along the way, the number of organizations under the Golkar Secretariat continued to swell. This then required the Golkar Secretariat to reorganize its entire structure, both at the national and local levels. This article uses a historical research method with four writing steps, namely: source search, source criticism, formulation of facts, and presentation of new ideas, a political approach. After various consolidations at the national and regional levels, the Golkar Secretariat which was previously only an organization has now turned into a political party with the name Golkar (Golongan Karya) which aims to become a government tool in the 1971 General Election. The main focus that the author will examine in this article is related to Golkar's political actions, especially those in Medan City in the 1971 elections. Another focus is, the author wants to explore and review issues related to Golkar's presence in Medan City. This is inseparable from Golkar's victory in Medan City in the 1971 General Election, even though at that time Golkar was considered a newcomer party.

Keywords: Joint Secretariat of Golkar; Golkar; 1971 Election; Medan City.

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk membahas bagaimana Orde Baru yang didominasi oleh matra Angkatan Darat menggunakan Sekber Golkar sebagai mesin politik dalam membela kepentingan pemerintah dan militer. Pada awalnya Sekber Golkar hanya diisi oleh sekitar 64 organisasi yang bernaung di bawahnya. Namun dalam perjalannya, jumlah organisasi yang bernaung di bawah Sekber Golkar terus membengkak. Hal ini kemudian mengharuskan Sekber Golkar mereorganisasi seluruh strukturalnya, baik pada tingkat nasional maupun lokal. Artikel ini menggunakan metode penelitian sejarah dengan empat langkah penulisan, yaitu: pencarian sumber, kritik sumber, perumusan fakta, dan penyajian pemikiran baru, dengan pendekatan politik. Setelah berbagai kondolidasi di tingkat nasional maupun daerah, Sekber Golkar yang sebelumnya hanya menjadi organisasi kini berubah haluan menjadi mesin politik dengan nama Golkar (Golongan Karya) yang bertujuan untuk menjadi alat pemerintah dalam Pemilu 1971. Fokus utama yang akan penulis kaji dalam artikel ini terkait dengan sepak terjang politik Golkar, terutama yang berada di Kota Medan pada pemilu tahun 1971. Fokus lainnya ialah, penulis ingin menggali dan mengulas persoalan yang berkaitan dengan kehadiran Golkar di Kota Medan. Hal ini tidak terlepas dari kemenangan Golkar di Kota Medan pada Pemilu 1971 walaupun pada saat itu Golkar dianggap sebagai partai pendatang baru.

Kata Kunci: Sekber Golkar; Golkar; Pemilu 1971; Kota Medan

PENDAHULUAN

Pada awal pemerintahan Suharto, tidak ada satupun partai politik yang mewakili kepentingan Angkatan Darat. Hal ini menjadikan Suharto dan rekan-rekan militernya memilih Sekretaris Bersama Golkar (Sekber Golkar) untuk dikembangkan menjadi mesin politik dengan maksud melanggengkan kekuasaannya sebagai presiden. Suharto memerintahkan para rekannya yang saat itu berasal dari empat kepala staf Angkatan Bersenjata, untuk memfasilitasi pengembangan Sekber Golkar baik pada tingkat nasional maupun daerah. Lewat prakarsanya, Sekber Golkar dapat berkembang dengan cepat,

ARTICLE HISTORY: Submitted: 2021-10-08 | Revised: 2021-10-13 | Accepted: 2021-10-14 | Published: 2021-10-15
HOW TO CITE (APA 6th Edition):
Simorangkir, R. J. D. (2021). Dinamika Perkembangan Golkar di Kota Medan: Golkar pada Pemilu 1971. *MUKADIMAH: Jurnal Pendidikan, Sejarah, dan Ilmu-Ilmu Sosial*. *5*(2), 252-260.
CORRESPONDANCE AUTHOR: ronggurrajadoli.simorangkir@gmail.com | DOI: https://doi.org/10.30743/mukadimah.v5i2.4431
This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Common Attribution License (http://creativecommons.org/license/by/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

bahkan pada tahun 1966 Sekber Golkar telah menaungi 262 organisasi di bawahnya (Wanandi, Chudori, & Bayuni, 2014, p. 34).

Sekber Golkar mengalami perkembangan yang cukup pesat akibat pemerintah dan ABRI pada masa itu bekerjasama dalam mengembangkan sayap Sekber Golkar sampai ke tiap-tiap daerah. Tidak hanya itu, gaung terhadap anti komunis yang menguat pada masyarakat Indonesia kala itu, menjadikan Sekber Golkar kian mendapatkan simpati, dan pada akhirnya anggota masyarakat memilih Sekber Golkar sebagai wadah organisasi politik mereka. Perkembangan yang pesat itu, mengharuskan organisasi ini menyederhakan organisasi yang dinaunginya, sehingga dibentuklah Kelompok Induk Organisasi (Kino). Kino sendiri memiliki tujuh bagian, antara lain: (1) Kino Kosgoro, (2) Kino Soksi, (3) Kino MKGR, (4) Kino Ormas Hankam, (5) Kino Karya Profesi, (6) Kino Gabungan Karya, (7) dan Kino Karya Pembangunan. Dari berbagai Kino yang ada hanya satu Kino yang dipimpin oleh kalangan sipil, sedang enam Kino lainnya dipimpin oleh para perwira Angkatan Bersenjata. Oleh karenanya, dapat dilihat bahwa Sekber Golkar telah didominasi oleh orang-orang dari Angkatan Bersenjata.

Ketika Sekber Golkar telah melalui berbagai macam konsolidasi di tingkat nasional, Sekber Golkar pun akhirnya direorganisasi dengan tujuan untuk menjadi mesin partai pada saat pemilu tahun 1971. Reorganisasi ini juga terjadi di hampir seluruh pengurus wilayah Sekber Golkar di Indonesia, tidak terkecuali yang ada di Kota Medan. Tidak berselang lama, Sekber Golkar yang sebelumnya hanya menjadi organisasi, berubah haluan menjadi mesin politik dengan nama Golongan Karya (Golkar), guna disiapkan untuk pemilu 1971. Setelah bertranformasi menjadi mesin politik, Golkar telah siap bertarung pada kancah pemilu nasional tahun 1971 dan menjadi awal pertunjukan Golkar sebagai organisasi politik. Pimpinan Golkar di tingkat nasional mengakui bahwa mereka tidak mempunyai harapan Golkar akan menang, tapi mengatakan bahwa mereka akan cukup puas jika menjadi salah satu dari "tiga besar" pemenang pemilu tahun 1971 (Reeve, Triwira, Nugraha, Ni'am, & Fallickard, 2013, p. 16).

Kenyataannya yang terjadi pada saat pemilu 1971 memberikan kejutan yang luar biasa bagi Golkar. Golkar menjadi salah satu partai politik yang mendapatkan suara tinggi, serta menjadikannya unggul di antara partai-partai peserta pemilu lainnya. Golkar mendapatkan 62,8 % suara, dan memenangkan 236 (65, 6%) dari 360 kursi DPR (Ardanareswari, 2019). Golkar memperoleh suara yang banyak di hampir setiap provinsi di Indonesia, salah satu yang terbanyak berasal dari Sumatera Utara. Bahkan di Kota Medan, Golkar memperoleh suara sebesar 50 %, unggul dari partai lainnya. Kendati demikian, mobilisasi massa, campur tangan pemerintah, serta peran Angkatan Bersenjata menjadi faktor keberhasilan Golkar unggul dalam pemilu 1971.

Pada artikel ini, penulis mencoba untuk menuliskan kembali berbagai dinamika politik yang dialami oleh Golkar. Fokus utama yang akan penulis kaji dalam artikel ini terkait dengan sepak terjang politik Golkar, terutama yang berada di Kota Medan pada pemilu tahun 1971. Fokus lainnya ialah, penulis ingin menggali dan mengulas persoalan yang berkaitan dengan kehadiran Golkar di Kota Medan. Artikel ini akan penulis mulai dari latar belakang kemunculannya, strategi politik yang dijalankan, serta siapa saja yang berperan menjadikan Golkar begitu mendominasi pemilu 1971, walaupun pada massa itu kita semua tahu, bahwa Golkar merupakan organisasi politik pendatang baru dalam kancah perpolitikan di Indonesia.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam menyusun artikel ini sepenuhnya menggunakan metode sejarah yang dimulai dengan tahap pencarian sumber, kritik sumber, perumusan fakta, dan penyajian pemikiran baru (Garraghan, 1957). Proses kerja penelitian ini dimulai dengan mengumpulkan sumber-sumber sejarah atau heuristik yang berkaitan dengan topik penelitian (Kartodirdjo, 1993, p.

47). Sumber data dalam artikel ini mengandalkan buku-buku dan jurnal yang dianggap penting dan mendukung penelitian, seperti karya-karya sejarah mengenai politik Indonesia, literatur tentang sejarah kota Medan, dan kajian-kajian ilmiah yang menjelaskan mengenai Golkar di Kota Medan. Selain itu untuk melengkapi kekurangan sumber, maka penulis melakukan wawancara dengan beberapa orang di Kota Medan yang berumur di atas enam puluh tahun, hal ini dimungkinkan karena mereka dianggap memiliki rekam jejak atas keterlibatan pada pemilu yang terjadi di tahun 1971.

Setelah seluruh sumber berhasil dikumpulkan, kemudian penulis melakukan kritik sumber untuk mengetahui valid atau tidaknya data yang yang telah dimiliki. Kritik sumber dilakukan secara eksternal dan internal (Kuntowijoyo, 1995, p. 74). Untuk mendapatkan keabsahan dari data, juga dilakukan uji silang antar data lisan dengan data tulisan. Kritik sumber ini juga dilakukan untuk mengatasi kelemahan yang dimiliki oleh sumber lisan. Hal ini dikarenakan narasumber dan penulis biasanya sering terjebak dalam pandangan yang bersifat romantisme, sehingga sulit memisahkan antara fakta dan asumsi pribadi. Setelah melalui tahap kritik sumber, maka selanjutnya penulis melakukan analisis terhadap isi buku, dokumen, dan hasil wawancara untuk mendapatkan fakta-fakta baru sehingga menghasilkan pandangan baru. Hingga setelahnya sampai pada tahap historiografi atau penulisan sejarah mengenai dinamika serta perkembangan Golkar di Kota Medan pada pemilu 1971.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinamika Politik Kota Medan Jelang Terbentuknya Sekber Golkar

Berbicara tentang kondisi sosial dan politik di Kota Medan tentu tidak terlepas dari berbagai peristiwa tentang PKI, ormas ormas anti PKI dan dugaan persekutuan antara TNI dengan ormas anti PKI. Kondisi politik di Kota Medan sebelum terjadinya kudeta 1965 umumnya berjalan dengan biasa saja tanpa ada suatu peristiwa yang menegangkan. Namun sesekali terjadi gesekan di lapangan antara organisasi sayap PKI dengan ormas anti PKI.

Minimnya gesekan politik di lapangan antar basis-basis organisasi PKI dan ormas anti PKI menandakan bahwa kekuatan PKI di Kota Medan sesungguhnya sangat kuat dan cukup berpengaruh, dan hal ini membuktikan bahwa kekuatan sayap-sayap organisasi kiri dan berbagai cabang organisasi induk dari PKI terlihat lebih dominan dalam hal pergerakan. Terlebih dalam memobilisasi massa guna mempengaruhi masyarakat agar turut bergabung dengan PKI.

Meskipun begitu, gerakan yang dibangun Angkatan Bersenjata untuk melawan pengaruh PKI terus dilakukan secara massif di berbagai tingkatan, mulai dari pinggiran kota sampai pusat kota, dengan mengandalkan kader yang berlatar belakang profesi (Burke, 1992, p. 3). Gerakan ini dibentuk melalui organisasi-organisasi kekaryaan seperti halnya para karyawan kantoran, sampai dengan buruh perkebunan. Organisasi-organisasi kekaryaan inilah yang kemudian menjadi pasukan yang nantinya siap melawan anggota dari PKI.

Organisasi lain yang anti PKI umunya tidak terlihat dominan dalam menarik simpul-simpul massa di masyarakat untuk melawan dominasi PKI. Hal ini terjadi akibat pengaruh dan dukungan yang besar dari aparat dan pemerintah pada masa itu. Kekuatan PKI dan sayap-sayap organisasi kiri lainnya baru dapat dilumpuhkan pasca PKI harus kalah akibat tragedi kudeta di Jakarta.

Terkuaknya kasus penculikan para Jenderal Angkatan Darat yang disertai dengan pembunuhan begitu cepat merebak sampai ke berbagai daerah tanpa terkecuali di Medan. Hal tersebut kemudian menjadi daya ledak baru bagi para ormas anti PKI yang selama ini menahan diri dari sikap semena-mena PKI, dan karenanya masyarakat anti PKI memiliki alasan yang kuat untuk kembali melawan orang-orang komunis. Sebenarnya pemberangusan PKI di Kota Medan tidak terjadi secara spontan pada saat meletusnya kudeta. Namun setelah beberapa bulan peristiwa kudeta terjadi,

barulah kemudian ada gerakan yang dilakukan dari berbagai organisasi seperti PP, HMI, SOKSI, dan organisasi kekaryaan lainnya.

Dua bulan pasca meletusnya peristiwa G30S di Jakarta, barulah Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumut, Zudi Daulay, membacakan instruksi Pemerintah pusat yang harus dijalankan Pemerintah Daerah untuk melumpuhkan kekuatan PKI. Zudi Daulay menghimbau kepada orang-orang PKI untuk menyerahkan diri. Namun himbauan tersebut tidak serta merta dipatuhi oleh orang-orang PKI, malah kelompok PKI tersebut terlihat siap untuk melawan berbagai gerakan dari ormas ormas anti PKI yang ingin memberangus PKI.

Berbagai ormas-ormas anti PKI pada 25 Oktober 1965 tersebut kemudian melakukan konsolidasi dan berkumpul di rumah Fendi Keling/Effendi Nasution dari PP. Di lokasi inilah berbagai pembahasan sering dibicarakan terkhusus mengenai tentang perlawanan terhadap PKI. Umunya orang-orang PKI yang ada di pusat kota jumlahnya tidak begitu banyak dan hanya tersebar di beberapa titik, seperti di Glugur Darat, Pusat Kota, Perumnas Mandala, dan daerah Kampung Keling dan yang terbesar ada di Kampung Kolam Percut (wawancara dengan Anwar Kongo, 14 Maret 2017).

Sebelum gesekan besar terjadi di Medan, Sekretaris IPKI (Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia) Sumut Kosen Cokrosentoro yang juga Kepala Penerangan Provinsi Sumut sekaligus Guru pengajar Pancasila pada era Presiden Soekarno bersama Ketua dua Partai IPKI bidang Pemuda MY. Effendi Nasution membawa Yan Paruhum Lubis/Ucok Majestic ke Jakarta untuk bertemu Ratu Aminah Hidayat dan Jenderal AH. Nasution di Cijantung. Ratu Aminah dan Jenderal AH. Nasution meminta kepada Ucok Majestic untuk membentuk para pengikut IPKI menjadi organisasi sayap partai, seperti Kubu Pancasila, Pemuda Pancasila, Sarjana Pancasila di Kota Medan dengan visi misi menjaga tetap utuh tegaknya 4 pilar kebangsaan.

Pada akhirnya gesekan pun terjadi antara massa PKI dengan ormas-ormas anti PKI. Pertikaian yang membesar terjadi antar sesama masyarakat sipil, serta melibatkan berbagai pertikaian yang mengarah kepada bentuk rasis, terutama kepada orang-orang keturunan Tionghoa. Tidak hanya sampai di situ, berbagai hal yang pada saat itu berhubungan langsung dengan RRC akan dijadikan target sasaran oleh para ormas anti PKI. Sebab yang terjadi adalah massa mendatangi kantor konsulat Cina dan memaksa untuk masuk ke dalam. Pertikaian yang terus-menerus memakan korban ini sangat sulit untuk dihentikan, ledakan dari dendam lama terlihat dipertontonkan pada kerusuhan ini. Hampir dapat dipastikan bahwa kerusuhan terjadi pada setiap titik, baik di pusat kota Medan maupun pinggiran, terutama berbagai daerah basis PKI.

Melihat situasi dan iklim politik masyarakat di Medan yang tidak menentu, Angkatan Bersenjata sebagai kekuatan Sospol dan Hankam menilai perlu untuk turun tangan dalam mengamankan berbagai kerusahan yang terjadi. Pada tanggal 26 Juli 1965, dibentuklah panitia persiapan di bawah pimpinan Letnan Kolonel T. A. Lingga dan Drs. Amir Husin Nasution sebagai sekretaris. Pada 1 Agustus 1965 Letnan Kolonel T. A. Lingga sebagai Ketua Sekber Golkar Sumut memberi mandat kepada Drs. Amir Husin Nasution untuk membentuk Sekber Golkar di Medan. Awal kehadiran Sekber Golkar di Medan sesungguhnya tidak begitu mempengaruhi apapun terhadap kondisi sosial politik di Medan. Namun hal tersebut menjadi titik awal kekuatan politik Golkar pasca habisnya perlawanan PKI di Medan.

Merancang Pemilu Untuk Golkar

Pemulihan stabilitas politik adalah tugas penting bagi Suharto setelah ia memperoleh Surat Perintah 11 Maret 1966 yang berisi tentang pengalihan kekuasaan dari Sukarno ke Suharto. Pada waktu itu, kelompok anti-komunis sedang membantu Angkatan Darat untuk memburu anggota PKI. Banyak organisasi massa yang berafiliasi dengan PKI dan PNI mengalami tekanan tentara yang ingin membubarkannya. Sementara kesatuan-kesatuan aksi (seperti KAMI dan HMI) menuntut pengadilan

umum untuk Sukarno yang dituduh terlibat Gestapu. NU dengan cepat mengumpulkan dukungan politik dari kelompok anti-PKI, dan mendesak agar pemilu segera diadakan (Wanandi et al., 2014).

Berbagai perencanaan yang dilakukan untuk mempersiapkan pemilu pada tahun 1968 menjadi kian penting. Pada Maret 1968, MPRS bersidang untuk menentukan tanggal pelaksaan Pemilu yang baru (Suryadinata, 1989, pp. 1 & 8). Pemerintah mengusulkan untuk menunda Pemilu selama lima tahun. Akan tetapi, partai-partai politik berhasil mendesak suatu kompromi yang mengharuskan pemerintah melaksanakan Pemilu pada 5 Juli 1971. Dalam sidang MPRS itu juga diputuskan mengangkat Suharto sebagai presiden penuh dengan masa jabatan lima tahun.

Setelah MPRS memutuskan menunda pelaksanaan pemilu, Panitia Khusus bersidang kembali. Namun perdebatan dalam pembahasan RUU Pemilu menjadi berlarut-larut. Sampai Oktober 1969, belum ada kesepatakan untuk mengesahkan RUU Pemilu. Poin penting dari perselisihan RUU Pemilu adalah: 1) keseimbangan jumlah kursi MPR di antara partai-partai politik dan kelompok-kelompok fungsional; 2) keseimbangan jumlah kursi antara kelompok fungsional dari anggota militer dan non-militer dalam MPR, DPR, dan DPRD; 3) jumlah anggota yang ditunjuk di DPRD; 4) kepemilikan hak untuk mencalonkan sebagai anggota golongan fungsional dari non-militer di MPR, DPR, dan DPRD; 5) jumlah utusan daerah di MPR; 6) pergantian anggota MPR dan DPR; dan 7) status anggota militer dan non-militer yang ditunjuk pemerintah untuk menduduki kursi MPR, DPR dan DPRD.

Suharto kemudian menengahi perdebatan yang berlarut-larut itu. Dia menemui para pempinan partai politik dan wakil Golkar secara terpisah. Akhirnya dicapai sebuah kompromi bahwa anggota-anggota yang diangkat untuk DPRD di tingkat provinsi dan kabupaten/kota tidak boleh melebihi 20 %. Sementara itu, faksi Angkatan Bersenjata di parlemen telah berkompromi dengan partai-partai politik supaya RUU Pemilu bisa disahkan meskipun dengan mengorbankan gagasan kelompok militan Orde Baru.

Ada pembicaraan di beberapa kalangan bahwa pemerintah sengaja menunda pengesahan RUU tersebut agar memiliki waktu untuk membangun kekuatan Golkar. Tuduhan ini mungkin tidak akurat, tapi kenyataannya tak dapat diabaikan karena setelah sidang MPRS tahun 1968 yang memutuskan untuk menunda Pemilu sampai tahun 1971, Suharto dan rekan-rekan militernya mengambil banyak keuntungan dari situasi itu.

Sejak tahun 1965 sampai 1967, pemerintah berupaya untuk memperkuat Golkar. Kursi Golkar di DPR-GR perlahan-lahan meningkat selama periode itu, dari 53,8% (161 kursi) sebelum Gestapu 1965 menjadi 54,9% (133 kursi) pada 1966, kemudian bertambah lagi menjadi 55,5% (194 kursi) tahun 1967. Namun proporsi kursi Golkar menurun menjadi 40,4% (167 kursi) pada 1968, sedangkan partai-partai politik memperoleh 59,6%(247 kursi) atau meningkat 99 kursi dibandingkan dengan jumlah kursi tahun 1967 (DPR-GR, 1970). Pemerintah tampaknya merestui berkurangnya proporsi kursi Golkar tahun 1968 dengan harapan partai-partai politik akan mendukungnya, sebab Golkar gagal menunjukkan kekuatannya. Sejak akhir tahun 1969, pemerintah mulai beralih ke Golkar sambil menjinakkan dan meninggalkan partai politik (Forges, 1993, p. 875).

Dinamika Golkar di Kota Medan Pada Pemilu 1971

Kampanye Golkar di Kota Medan sangat meriah dan ramai diikuti oleh masyarakat kota Medan. Umbul-umbul dan bendera Golkar terpasang di sepanjang jalan protokol hingga sampai ke kampung-kampung yang berada di sudut kota. Hampir seluruh peserta yang mengikuti kampanye Golkar menggunakan atribut Golkar, mulai dari baju, ikat kepala, bendera, model rambut dengan ukiran Golkar, dan bahkan ada yang mencat tubuhnya dengan warna kuning sebagai simbol kecintaan terhadap Golkar.

Kampanye Golkar menjadi yang paling meriah dari kampanye partai lain. Hal ini tentu tidak terlepas dari pengaruh dukungan pemerintah pada saat itu terhadap Golkar. Sementara partai-partai lain mendapat batasan dalam melakukan kegiatan kampanye. Mulai dari atribut, sampai massa yang mengikuti kampanye partai selain Golkar harus melapor terlebih dahulu. Apabila tidak ada laporan, maka kampanye akan dibatalkan. Pembatasan dalam penggunaan atribut kampanye, baik jumlah bendera yang dibawa, jenis atribut yang digunakan, serta adanya larangan memajang foto-foto Bung Karno. Namun pada saat itu pemerintah menggunakan dalih agar eks komunis tidak ikut menyusup dalam aktifitas partai politik menuju pemilu 1971 (wawancara dengan Husni Thamrin, 12 Desember 2016).

Berbagai hal yang demikian itu tentu menjadikan kampanye dari partai-partai lain di luar Golkar sunyi, ketimbang kampanye yang dilakukan Golkar. Golkar mendapat porsi yang berbeda dengan partai-partai lain saat melakukan kampanye. Jika partai lain mendapat jatah sebulan sekali untuk melakukan kampanye akbar, maka Golkar bisa sampai dua, tiga kali melakukan kegiatan tersebut. Golkar juga tidak ada pembatasan jumlah atribut, jumlah massa dan berbagai larangan lainnya dalam aktifitas kampanye, dan seluruh aktifitas tersebut mendapat dukungan yang baik oleh pemerintah. Bahkan massa yang ikut kampanye juga diangkut dengan menggunakan fasilitas ABRI seperti truk dan pick up untuk konvoi menuju lokasi kegiatan kampanye (wawancara dengan Entis Suka Ramais, 23 Mei 2017).

Pada saat hari pemilihan, kondisi Kota Medan sangat tenang karena sedikit kendaraan yang melintas di jalan raya. Hampir semua toko ditutup. Tempat pemungutan suara menjadi tempat komunitas berkumpul dengan rasa kesungguhan dan kemeriahan. Hansip bekerja sebagai penjaga tempat pemungutan suara. Polisi ada di mana-mana, dan markas militer bersiaga untuk mengantisipasi jika kemungkinan akan terjadi kekacauan.

Sejak tahun 1969, seluruh pegawai negeri di Kota Medan dan daerah lainnya harus terdaftar sebagai anggota Golkar dan setiap pegawai negeri memiiki kartu anggota Golkar. Pembagiaan kartu anggota Golkar tersebut bertujuan untuk mendata sekaligus sebagai penambahan anggota yang nantinya akan dimasukkan ke dalam strukural pengurus Golkar (wawancara dengan Nautir Siregar, 23 Desember 2016). Semua pegawai negeri diwajibkan melapor ke kantor mereka pada pukul 07.30 WIB. Di kantor, para pegawai negeri mendengar pidato Presiden Suharto dan hal ini terus berlanjut hingga masa pencoblosan.

Sebagian besar tempat pemungutan suara memulai pemilihan setelah pukul delapan dan kotak suara ditutup pada siang harinya. Panitia tempat pemungutan suara menghitung jumlah suara – disaksikan perwakilan setiap partai – dengan cara membuka setiap surat suara dari kotak dan mengumumkan nama partai yang dipilih dengan speaker agar warga di sekitar tempat pemungutan suara bisa mendengarnya (wawancara dengan Husni Thamrin, 12 Desember 2016). Golkar memperoleh 50 % suara di kota Medan. Di tingkat nasional, Golkar dipilih lebih dari 34 juta orang atau 62,80 % dari total suara. Golkar memenangkan 227 kursi dari 460 kursi di DPR (Suryadinata, 1989, p. 48).

Tabel 1. Jumlah perolehan suara Golkar pada Pemilu 1971 di Kota Medan

No	Partai	Jumlah Suara	Persentase
1	Partai Katolik	6.393	3%
2	PSII	5.327	2,5%
3	NU	9.589	4,5%
4	Parmusi	37.290	17,5%
5	Golkar	106.543	50%
6	Parkindo	19.178	9%
7	Murba	3.196	1,5%
8	PNI	17.047	8%
9	Perti	3.196	1,5%
10	IPKI	5.327	2,5%

Sumber: Surat Kabar *Waspada,* 11 Desember 1971.

Koalisi Pemerintah dan ABRI, Melihat Golkar dari Medan

Ali Murtopo menjelaskan mengenai kemenangan Golkar pada pemilu tahun 1971, ia menjelaskan "Beberapa kalangan berpandangan bahwa kemenangan Golongan Karya terjadi karena beberapa faktor berikut: tersedianya dana, dukungan pejabat terutama dari ABRI, pembentukan Korpri di dalam berbagai kementerian, lembaga-lembaga dan perusahaan-perusahaan, dan juga karena berbagai macam intimidasi. Semua ini tentu saja memberikan sumbangan pada kemenangan Golongan Karya" (Murtopo, 1974, pp. 82–83).

Kemenangan Golkar pada Pemilu 1971 mengejutkan semua pihak, bahkan pemerintah sekalipun. Golkar memperoleh 62,8 % suara, memenangkan 236 (65,6%) dari total 360 kursi di DPR yang diperebutkan (Ricklefs, 2008, pp. 585–586). Golkar meraih suara terbanyak di semua provinsi, mengalahkan perolehan suara partai-partai non-pemerintah. Di Sumatera Utara saja, perolehan suara Golkar mencapai 70 % dari 2.546.564 total suara (Nishihara, 1972, p. 66). Bahkan di Kota Medan, Golkar lebih unggul dari partai-partai lain dengan perolehan 50% suara ("Perolehan Suara Golkar Pada Pemilu 1971 di Kota Medan," 1971).

Kesuksesan Golkar meraih suara terbanyak pada Pemilu merupakan hasil strategi dari pemerintah, sebab semuanya tak mungkin berhasil jika mengandalkan kemampuan dan sumber daya Golkar sendiri. Pemerintah menggunakan sumber daya Departemen Dalam Negeri, Departemen Hankam, dan Opsus Ali Murtopo untuk mengatur kemenangan Golkar dalam pemilu 1971.

Pada masa Orde Baru, peran militer jauh melampaui peran spesifiknya di bidang pertahanan nasional. Keterlibatan militer di bidang politik pantas disebut sebagai sebuah intervensi. Setelah Orde Baru berdiri, salah satu bentuk perwujudan fungsi ABRI sebagai kekuatan sosial politik adalah penugasan prajurit ABRI dalam lembaga, instansi, badan atau organisasi di luar jajaran ABRI. Walaupun pada awalnya memiliki maksud untuk mengamankan bangsa dari pengaruh komunisme. Tetapi sesungguhnya penugasan itu juga dimaksudkan untuk menyukseskan program pembangunan Orde Baru termasuk dalam hal urusan politik demi melanggengkan kekuasaannya. Selain itu, militer juga mengisi kursi di lembaga legislatif, baik di DPR maupun DPRD yang diperoleh melalui penjatahan, bukan melalui pemilihan umum yang kompetitif.

Peran militer yang dominan itu seakan selaras dengan fakta bahwa militer adalah tentara rakyat, dari rakyat dan untuk rakyat dan konsekuensinya dikotomi sipil-militer tidak dikenal dalam sistem politik Indonesia dan kedudukan militer dalam jabatan-jabatan sipil dapat dibenarkan. Secara

struktural, organisasi ABRI disusun mengikuti struktur organisasi pemerintahan sipil, mulai dari Bintara Pembina Desa atau Babinsa di tingkat Kelurahan, Komando Rayon Militer (Koramil) di tingkat Kecamatan, Komando Distrik Militer (Kodim) di tingkat Kabupaten/Kota, Komando Resor Militer (Korem) di tingkat Kabupaten dan Komando Daerah Militer (Kodam) di tingkat Provinsi (wawancara dengan Usman Pelly, 9 September 2016).

Pendekatan keamanan yang represif dengan menggunakan segenap kekuatan militer untuk menjaga stabilitas politik dan keamanan tidak memberikan peluang bagi masyarakat sipil untuk turut andil pada proses politik kenegaraan, hal ini jugalah yang terjadi di kota Medan. Keberadaan partai politik oposisi dan organisasi sosial masyarakat tidak lebih hanya dianggap sebagai rekayasa demokrasi dan legalisasi pelengkap sistem politik yang ada. Pendekatan keamanan telah menjadi alasan untuk membenarkan kewenangan pemerintah dalam merepresi rakyat, sementara rakyat dibatasi hak dan kebebasannya. Sehingga dalam hal ini juga yang menjadikan Golkar menjadi sebuah partai yang melenggang bebas dan menjadi begitu mendominasi pada pemilu 1971 di Kota Medan.

Tidak hanya itu saja, kemunculan berbagai macam organisasi baru di Medan adalah wujud untuk melegitimasi gerakan dukungan, baik terhadap ABRI maupun gerakan politik bagi Golkar. Beberapa organisasi yang muncul di Medan saat itu di antaranya, organisasi yang dinamakan Petani ABRI, Buruh ABRI, Nelayan ABRI, Asosiasi Karyawan ABRI dan banyak lagi organisasi profesi lainnya yang menggunakan nama ABRI di belakangnya. Secara politik tentu hal ini sangat menguntungkan bagi Golkar, karena memang massa simpatisannya ABRI sudah tentu adalah massanya Golkar pada saat itu (wawancara dengan Usman Pelly, 9 September 2016).

SIMPULAN

Sejarah politik di Kota Medan tidak dapat dipisahkan dari peristiwa-peristiwa nasional. Dalam arti, sejarah politik di Kota Medan adalah perpanjangan dari peristiwa-peristiwa nasional. Hal ini juga berlaku untuk sejarah pembentukkan Sekber Golkar dan Golkar di kota Medan. Restrukturasi Sekber Golkar dilakukan dengan maksud menghadapi pemilu tahun 1971. Kepengurusan Sekber Golkar di Kota Medan sebagian besar dipegang oleh Angkatan Darat. Dengan berbagai dorongan dari pemerintah dan ABRI akhirnya Golkar meraih kemenangan besar dalam pemilu 1971, baik di tingkat nasional maupun di Kota Medan.

REFERENSI

Ardanareswari, I. (2019). Demokrasi Semu dalam Sejarah Pemilu Pertama Orde Baru Tahun 1971. Retrieved October 8, 2021, from tirto.id website: https://tirto.id/demokrasi-semu-dalam-sejarah-pemilu-pertama-orde-baru-tahun-1971-dlYX

Burke, P. (1992). *New Perspectives on Historical Writing*. Pennsylvania: The Peensylvania State University Press.

DPR-GR, S. (1970). *Seperempat Abad Dewan Perwakilan Rakjat Republik Indonesia*. Jakarta: tanpa penerbit.

Forges, R. V. Des. (1993). The Military Revolution and Political Change: Origins of Democracy and Autocracy in Early Modern Europe. *The Journal of Asian Studies*, *52*(4), 961–963. https://doi.org/10.2307/2059349

Garraghan, G. J. (1957). *A Guide to Historical Method*. New York: Fordham University Press.

Kartodirdjo, S. (1993). *Pendekatan Ilmu-Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Kuntowijoyo. (1995). *Metode Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana.

Murtopo, A. (1974). *Strategi Politik Nasional*. Jakarta: Centre for Strategic and International Studies.

Nishihara, M. (1972). *Golkar and the Indonesian Elections of 1971*. New York: Modern Indonesia Project Cornell University.

Perolehan Suara Golkar pada Pemilu 1971 di Kota Medan. (1971). *Waspada*.

Reeve, D., Triwira, G., Nugraha, I., Ni'am, L., & Fallickard, R. (2013). *Golkar Sejarah yang Hilang: Akar Pemikiran & Dinamika*. Depok: Komunitas Bambu.

Ricklefs, M. C. (2008). *Sejarah Indonesia Modern*. Jakarta: Serambi.

Suryadinata, L. (1989). *Military ascendancy and political culture: a study of Indonesia's Golkar*. Ohio: Athens Ohio.

Wanandi, J., Chudori, L. S., & Bayuni, E. (2014). *Menyibak Tabir Orde Baru: Memoar Politik Indonesia 1965-1998*. Jakarta: Kompas.

Daftar Informan:

1) Usman Pelly (Tokoh Pendiri Golkar di Kota Medan).
2) Sutris atau Entis Suka Ramais (Pengurus Soksi Kota Medan 1969).
3) Husni Thamrin (Ketua Eksponen 66 Kota Medan).
4) Nautir Siregar (Pensiunan Guru sekarang berusia 68 tahun).

Copyright Holder **©Ronggur Raja Doli Simorangkir** | Copyright Year **2021**
Licence URL **https://creativecommons.org/licenses/by/4.0**